

Proyek MP3EI Tak Mampu Tekan Biaya Tinggi

Masih berkuat
di Jawa.

JAKARTA — Sejumlah pengamat mengkritik megaprojek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), yang digadang-gadang mampu menyelesaikan masalah infrastruktur. Alasannya, dari sejumlah proyek di sejumlah koridor, tidak ada yang mendorong pembangunan infrastruktur kelautan.

"Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan, tapi proyek-proyek di MP3EI bukan mendorong konektivitas dalam arti sebenarnya, karena masih berkuat di transportasi darat," ujar ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, kemarin.

Dia mencontohkan, dua proyek besar, seperti pembangunan tol trans Sumatera dan jembatan Selat Sunda,

bukan jawaban untuk mengatasi biaya tinggi yang sering dikeluhkan pengusaha. Sebab, transportasi darat yang akan digenjut dari dua proyek ini hanya akan menimbulkan kemacetan dan inefisiensi.

Industri maritim dan jaringan konektivitas antarpulau, menurut Faisal, mampu menaikkan perekonomian nasional. Faktor geografis membuat jarak ekonomi di negara yang memiliki lebih dari 13.487 pulau ini akan semakin jauh dan berdampak pada biaya pengiriman barang antarpulau di Indonesia.

Faisal mencontohkan, harga beras di daerah Jawa Barat berada pada level Rp 4.250 per liter, lebih rendah daripada harga beras di Kabupaten Paniai, Papua, yang sebesar Rp 18 ribu per liter. Contoh lain, harga jeruk Medan, yang Rp 20 ribu per kilogram, masih lebih mahal

ketimbang jeruk Cina sebesar Rp 17 ribu per kilogram. "Ini karena tidak adanya konektivitas maritim," kata Faisal.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan proyek-proyek di MP3EI kebanyakan berlokasi di Jawa. Hal ini bakal mendorong ketimpangan perekonomian Jawa dengan Luar Jawa. "Jawa yang makin sesak malah menjadi lahan bisnis untuk sebagian orang. Sedangkan di luar Jawa, kondisinya makin tertinggal," ujarnya. Ketimpangan juga terjadi antara kondisi perkotaan dan pedesaan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan bahwa sebagian besar proyek berlokasi di Jawa karena pulau ini masih sangat menarik bagi investor. Tapi, kalau peresmian sejumlah proyek

dilihat tahun ini, sebetulnya nilai investasi terbesar berasal dari Papua, Maluku, dan Maluku Utara. "Itu tugas kami untuk mendorong agar di luar Jawa dengan cara paket insentif," tuturnya.

Pemerintah juga mendorong pengembangan bandar udara dan pelabuhan. "Kalau tidak ada 20-an bandara yang (diyakini) akan selesai, mana mungkin Lion Air beli 24 pesawat?" kata Hatta.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah, Lucky Eko Wuryanto, mengakui bahwa peningkatan konektivitas salah satunya membutuhkan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang besar. "Saat ini harus diakui belum berjalan sebagian yang diinginkan," kata dia. ● RR ARYANI | AMRI MAHBUB |

JANGGA SUKMA WIJAYA